



**MENGGANTUNG:** Pengemudi mengoperasikan kendaraan roda tiga bajaj Maxride saat melintas di kawasan Kleringan, Kota Jogja, kemarin (10/12). Driver bajaj belum semua berani beroperasi sebab SE wali kota terkait larangan operasional belum jelas. Dishub Kota Jogja akan menindaklanjuti setelah Nataru. GUNTUR AGA TIRTANARADAR JOGJA

## Dilema Driver Bajaj Digantung Aturan Larangan

Tindak Lanjut SE Wali Kota Dilakukan setelah Akhir Tahun

**JOGJA** - Dilema dirasakan para *driver* Bajaj Maxride di tengah aturan operasional kendaraan roda tiga yang masih menggantung di Kota Jogja. Ini menyusul surat edaran (SE) Wali Kota Jogja terkait larangan operasional kendaraan tersebut. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja pun akan melakukan tindak lanjut terkait aturan tersebut setelah penanganan Jembatan Kewek, Kleringan, selesai. "Kami fokus di penanganan (Jembatan) Kewek dan Nataru dulu," ujar Kepala Dishub Kota Jogja Agus Arif Nugroho saat dikonfirmasi, kemarin (10/12).

Diketahui, Pemkot Jogja telah resmi melarang operasional kendaraan bermotor roda tiga untuk angkutan penumpang. Hal itu termaktub dalam SE Nomor 100.3.4/3744 Tahun 2025 tentang Larangan Operasional Kendaraan Bermotor Roda Tiga Sebagai Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Jogja yang ditandatangani Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo pada 31 Oktober 2025.

"Kami sudah ada rapat di Ditlantas Polda DIJ dipimpin Pak Dirlantas langsung (terkait tindak lanjut SE Wali Kota Jogja)," bebemnya.

Terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Bajaj Maxride Sapto mengatakan, menggantungnya aturan melalui SE Wali Kota Jogja tersebut menyebabkan para *driver* tidak sepenuhnya man-

tab memutuskan untuk beroperasi. Padahal, momentum menjelang libur Nataru merupakan waktu yang tepat untuk menaikkan pendapatan mereka.

"Kami bukannya mau melanggar, tapi aturannya tidak kunjung turun. Wisatawan mulai datang, tapi kami tetap bingung ini boleh atau tidak. Kalau nekat jalan, takut nanti tiba-tiba ada penertiban," ujar laki-laki yang juga merupakan *driver* Bajaj Maxride itu.

Setelah SE tersebut terbit, ia mendapatkan informasi dari sesama para *driver* bahwa banyak yang memangkas jam operasional. Sebab, mereka takut dianggap melanggar aturan. "Mereka lebih banyak menunggu dibandingkan berkeliling," paparnya.

Ia berharap, pemerintah segera dapat menerbitkan regulasi yang jelas. Misal seperti pengaturan zonasi operasi bagi mereka. "Kami ikut aplikasi resmi, kendaraan dicek, kami bayar pajak, semua tertib. Tapi ya itu, aturan belum ada. Kami merasa digantung," tandasnya.

*Driver* Bajaj Maxride lainnya, Wahyu menambahkan, banyak *driver* yang merasa takut untuk mengambil orderan. Sehingga memilih untuk menolak perjalanan dengan rute tertentu demi menghindari risiko razia dan sebagainya.

"Kami takut kalau nanti kena razia bagaimana? Mau jelaskan ke penumpang juga bingung soalnya belum ada aturan resmi," ujarnya. (**oso/wia/fj**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 12 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005